

DISPARITAS SPASIAL INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010

Gita Arfiani
gita.arfiani@gmail.com

Umi Lisyaningsih
listyaningsih_umi@yahoo.com

Abstract

In 1996 and 1999 Daerah Istimewa Yogyakarta ranked first of Gender Development Index in national level. The aim of the research are to know determine the distribution, development, and determine the contribution of inter-indicator of Gender Development Index by district/city in Daerah Istimewa Yogyakarta.

The data used in this research is secondart data. Gender Development Index and the data obtained from the publications variable reports from Central Bureau of Statistic (BPS), National Development Planning Agency (BAPPENAS), dan United Nations Development Programme (UNDP). The method used is descriptive quantitative analysis, spatial comparative analysis, and temporal comparative analysis.

The conclusion of this research is, Yogyakarta is a capital city of Daerah Istimewa Yogyakarta, which has a value of Gender Development index and the highest indicator in Daerah Istimewa Yogyakarta in 1999-2010. Indicators that contribute most to the achievement values Gender Development Index is an index of health.

Key words: *Gender Development Index, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indicator contribute*

Abstrak

Pada tahun 1996 dan 1999 Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat pertama ditingkat nasional, namun pada tahun 2002-2010 turun menjadi peringkat dua. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui distribusi, perkembangan, serta mengetahui kontribusi antar indikator Indeks Pembangunan Gender menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Indeks Pembangunan Gender dan variabelnya diperoleh dari hasil publikasi laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan *United Nations Development Programme* (UNDP). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, analisis komparatif spasial, dan analisis komparatif temporal.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Gender dan indikatornya tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1999 -2010. Indikator yang paling berkontribusi terhadap pencapaian nilai Indeks Pembangunan Gender adalah indeks kesehatan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Gender, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kontribusi Indikator

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Gender mempunyai fungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kuliatas sumber daya manusia pada suatu daerah, yang dalam pengukuran parameternya dipisahkan menurut jenis kelamin. Selain itu Indeks Pembangunan Gender juga digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan kualitas manusia. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Gender hingga akan mencapai nilai 100 maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan manusianya, (BPS, 2011).

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Gender tidak jauh berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) variabel yang digunakan pun sama, hanya dalam Indeks Pembangunan Gender lebih dirinci ke dalam jenis kelamin, karena fungsi dasar Indeks Pembangunan Gender itu sendiri adalah untuk mengukur ketimpangan gender pada pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur pembangunan manusia tanpa mempedulikan jenis kelamin. Indeks Pembedayaan Gender (IDG) merupakan alat untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada bidang politik dan ekonomi, (BPS, 2011).

Pada tahun 1990 Laporan Pembangunan Manusia merancang Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur kemajuan sosial-ekonomi, sejak itu tiga indeks tambahan dikembangkan, antara lain: Indeks Kemiskinan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pembangunan Gender mulai dihitung di Indonesia pada tahun 1996, dan perhitungannya dilakukan setiap tiga tahun sekali, berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan satu tahun sekali (BPS dan UNDP, 1997).

Nilai Indeks Pembangunan Gender pada tiap provinsi di Indonesia berbeda-beda, dan tiap tahunnya pun dalam satu provinsi dapat berbeda-beda nilainya. Demikian pula di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Masing-masing kabupaten/kota tersebut mempunyai kondisi geomorfologi yang berbeda-beda, kondisi tersebut akan berdampak pada terciptanya kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda pula. Kondisi sosial seperti kesehatan dan pendidikan serta kondisi ekonomi sangat mempengaruhi pencapaian nilai Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Gender dan Peringkatnya Provinsi di Pulau Jawa tahun 1996-2010

Nilai IPG				
Provinsi	1996	1999	2002	2010
DKI Jakarta	64,3	61,2	66,7	73,3
Jawa Barat	58,6	54,6	56,3	62,3
Jawa Tengah	62,7	57,4	58,7	65,7
D.I Yogyakarta	70,7	66,4	65,2	72,5
Jawa Timur	58,8	53,2	56,3	65,1
Banten	-	-	54,9	62,8

Sumber: BPS dan UNDP, 2002-2011

Tabel 1 menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Gender di Pulau Jawa menurut provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun mengalami penurunan pada tahun 1999 dalam nilai Indeks Pembangunan Gender, namun masih lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya, kecuali DKI Jakarta pada tahun 2002-2010. Menurut data BPS tahun 2002-2011, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996-1999 menduduki peringkat pertama, dan pada tahun 2002-2010 menduduki peringkat kedua, setelah peringkat pertama diduduki oleh DKI Jakarta.

Tabel 2 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2010

Tahun	IPM	IPG
1990	68,5	65,7
1996	71,8	70,7
1999	68,7	66,4
2002	70,8	65,2
2005	73,5	70,2
2010	75,7	72,5

Sumber: BPS dan UNDP, 1997-2011

Tabel 2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu pula dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Gender hingga melebihi nilai Indeks Pembangunan Manusia maka dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan gender (BPS, 2008). Namun, faktanya nilai Indeks Pembangunan Gender masih berada dibawah nilai Indeks Pembangunan Manusia, yang menandakan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terjadi ketimpangan gender (lihat tabel 2). . Padahal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sehingga dengan melihat fakta dari data pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi, maka cita-cita INPRES RI no.9 tahun 2000 tersebut dapat dikatakan belum tercapai.

Sejak tahun 2000 disepakati bahwa *Millenium Development Goals* (MDGs) ditetapkan sebagai tolak ukur dalam pembangunan kependudukan. *Millenium Development Goals* mempunyai 8 tujuan dan 18 target, salah satu tujuannya yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan targetnya pada tahun 2005 menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan, dengan melihat pada

tabel 2 maka dapat dikatakan bahwa target MDGs belum tercapai.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang dapat diperoleh melalui instansi-instansi yang menyediakan. Data-data Indeks Pembangunan Gender maupun variabelnya dapat diperoleh melalui hasil publikasi laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan *United Nations Development Programme* (UNDP). Variabel-variabel data diperoleh dari publikasi hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Produk Domestik Bruto (PDRB), dan diperoleh dari dinas/instansi Pendidikan dan Kesehatan. Variabel data Indeks Kesehatan diperoleh dari hasil SUSENAS dan Dinas Kesehatan, variabel Indeks Pendidikan diperoleh dari hasil SUSENAS dan dinas pendidikan, sedangkan variabel Indeks Ekonomi diperoleh dari hasil SAKERNAS dan PDRB.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu analisis deskriptif kuantitatif, analisis komparatif spasial dan analisis komparatif temporal. Kedua analisis tersebut digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini.

Analisis deskriptif kuantitatif merupakan salah satu cara analisis data dengan mendeskripsikan karakteristik data yang ditampilkan dalam bentuk tabel tunggal dan tabel silang baik menurut kabupaten/kota maupun menurut waktu. Analisis ini merupakan analisis utama dalam penelitian ini, karena dasar dari penelitian ini adalah menganalisis data yang telah disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

Analisis komparatif spasial merupakan sebuah analisis yang melihat suatu masalah dengan membandingkan sudut pandang keruangannya dari daerah kajian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui distribusi persebaran Indeks

Pembangunan Gender kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, analisis komparatif spasial juga digunakan untuk menganalisis kontribusi antar indikator dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis komparatif temporal merupakan salah satu metode analisis dengan membandingkan dua atau lebih data dengan waktu perolehan data yang berbeda. Dalam penelitian ini diperlukan analisis komparatif temporal karena pada dasarnya penelitian ini membandingkan data Indeks Pembangunan Gender antar tahun (*trend*), dengan mengetahui perbandingan *trend* indikator Indeks Pembangunan Gender, maka dapat dianalisis perkembangan Indeks Pembangunan Gender disetiap tahunnya, dan kontribusi masing-masing indikator dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender disetiap tahunnya pada tiap-tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

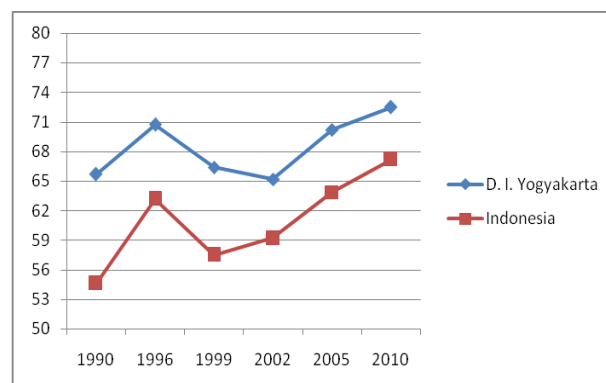
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan IPG Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang nilai Indeks Pembangunan Gendernya paling baik di Indonesia pada tahun 1990-1999. Tahun 2002 peringkat Indeks Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta digeser oleh DKI Jakarta sehingga sejak tahun 2002-2010 nilai Indeks Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada tingkat nasional. Tingginya nilai Indeks Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan banyak kebijakan-kebijakan yang berbasis gender. Selain itu pemerintah provinsi maupun daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha untuk mencapai cita-cita INPRES RI no.9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Seperti yang dikatakan oleh Staff Perencana Wilayah BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat *indepth interview*:

“Tingginya nilai IPG DIY itu tidak lain hanya mengacu pada peraturan presiden tentang pengarus utamaan gender.

Sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang pro gender. Contohnya, seperti dalam bidang kesehatan, ada jampersal (jaminan persalinan), ada sosialisasi kesehatan reproduksi yang sasaran utamanya adalah perempuan, dan posyandu lansia. Pada bidang ekonomi pemerintah memang telah mengadakan Anggaran Responsif Gender sejak tahun 2008, dan sebelumnya pemerintah juga telah membuat Perencanaan Pembangunan Responsif Gender. Namun, memang dalam bidang pendidikan belum ada pemilahan antara laki-laki dan perempuan, karena pendidikan itu hak asasi manusia. Tetapi, pemerintah juga mengadakan sosialisasi-sosialisasi dalam bidang pendidikan kepada orang tua sehingga kualitas penduduk dalam hal pendidikan dapat meningkat. Pada sosialisasi tersebut sasaran utamanya adalah perempuan yang partisipasi dalam pendidikan masih rendah.”

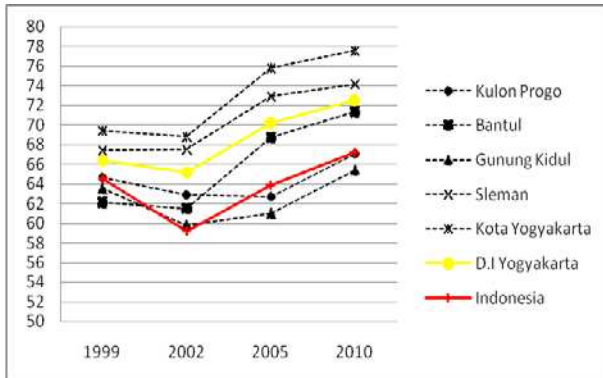


Sumber: Diolah dari data BPS, 1996- 2011

Gambar 1 *Trend* IPG Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2010

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui nilai Indeks Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1990-2010 mengalami peningkatan dan penurunan. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 1996 Indeks Pembangunan Gender Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia mengalami penurunan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Dampak dari krisis moneter adalah

turunnya kurs rupiah terhadap dolar amerika, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar dan mengakibatkan PHK besar-besaran, dengan demikian banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar penduduk pun banyak yang tidak terpenuhi, (Utami, 2011).



Sumber: Diolah dari data BPS, 1999-2011

Gambar 2 *Trend IPG Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta dan Indonesia Tahun 1999-2010*

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 1999 IPG Indonesia jauh tertinggal dengan IPG-IPG kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta IPGnya menduduki peringkat pertama ditingkat nasional. Namun, dari tahun 1999-2010 nilai IPG Indonesia terus mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut masih harus perlu ditingkatkan, mengingat nilai IPG Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPG Daerah Istimewa Yogyakarta. IPG Daerah Istimewa Yogyakarta jika dibandingkan dengan IPG Indonesia sudah cukup bagus, namun jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada dibawahnya. IPG Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah berada diatas IPG Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, IPG Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 dan 2010, dan Kabupaten Gunungkidul, dari tahun 2002-2010 masih dibawah IPG Indonesia.

Gambar 2 menunjukkan bahwa, IPG Kabupaten Kulon Progo yang pada tahun 2002 sudah berada diatas IPG Indonesia, namun pada tahun 2005 dan 2010 kembali berada di bawah IPG Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai IPG Kulon Progo cenderung tetap ditahun 2005 dan IPG Indonesia naik secara

drastis ditahun 2005. Sedangkan IPG Kabupaten Bantul dari tahun 1999 -2010 selalu mengalami kenaikan, yang pada awalnya tahun 1999 mempunyai IPG terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pada tahun 2010 IPGnya hampir menyamai Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul tingkat kenaikan IPGnya tidak signifikan kabupaten/kota lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2002-2010 tidak banyak terjadi perubahan.

Kota Yogyakarta mempunyai IPG paling tinggi diantara daerah lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu fasilitas-fasilitas umum di kota jauh lebih baik dibandingkan dengan di kabupaten lainnya. Akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar di daerah kota cenderung lebih mudah. Hal ini lah yang menyebabkan IPG di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan IPG kabupaten lainnya.

Nilai IPG Kota Yogyakarta paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini dikarenakan, Kota Yogyakarta merupakan ibukota provinsi, sehingga akses ke tepat pelayanan umum yang dapat menunjang kebutuhan dasar dapat diakses dengan mudah. Jika pelayanan pendidikan dapat diakses dengan mudah, penduduk disuatu daerah akan mempunyai standar hidup yang tinggi, maka tingkat kesehatannya pun juga tinggi. Jika tingkat kesehatan tinggi maka penduduk dapat melakukan produktivitas yang tinggi pula, sehingga nilai ekonominya pun juga akan tinggi.

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul merupakan dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, sehingga pengaruh budaya dan pola hidup penduduk kota berpengaruh terhadap dua kabupaten tersebut, sehingga nilai IPGnya tidak begitu rendah. Lain halnya dengan Kabupaten Gunungkidul dan kabupaten Kulon Progo yang daerahnya jauh dari pusat kota sehingga pengaruh budaya dan pola hidup penduduk kota sangatlah sedikit. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai IPG, karena nilai IPG

dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menurut Staff Perencana Wilayah BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tinggi-rendahnya nilai IPG di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta karena faktor kondisi geografis, dan faktor kondisi geografis tersebut mengakibatkan mudah atau tidak sarana aksesibilitas di suatu daerah. Pada saat *indepth interview*, beliau mengatakan:

“IPG berasal dari 3 komponen: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan aksesibilitas dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu daerah. Dari sektor ekonomi, di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta yang daerahnya cenderung datar, cocok untuk mengembangkan industri, sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, daerahnya bergelombang, aksesnya susah rata-rata kondisi ekonomi daerahnya hanya bertumpu pada sektor agraris. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan penduduk daerah setempat. Akses untuk menuju sarana pendidikan di Gunungkidul itu cukup sulit, dan rata-rata orang tuanya cenderung berfikir jika anak bekerja lebih membawa hasil dari pada sekolah hanya membuang-buang duit. Begitu juga dengan akses terhadap fasilitas kesehatan, walaupun ada jamkesmas tetapi kalau rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan aksesnya susah, sama saja tidak terpakai. Sehingga pada tahun 2005 pemerintah mengadakan ambulans berbasis komunitas.”

2. Perkembangan antar Indikator dalam IPG

Pada tahun 1999-2002 menurut data BPS tahun 2002 nilai Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pada tahun 1999 70.4 untuk penduduk laki-laki dan 74.2 untuk penduduk perempuan. Sedangkan pada tahun 2002 70.9 untuk penduduk laki-laki dan 74.8 untuk

penduduk perempuan. Pada tahun 2005 nilai Angka Harapan Hidup paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Kulon Progo, yaitu 71.2 untuk penduduk laki-laki dan 75.2 untuk penduduk perempuan. Berdasarkan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, menyatakan bahwa:

“Nilai AHH Kabupaten Kulon Progo memang tinggi, karena Kulon Progo mempunyai kebijakan-kebijakan dalam hal kesehatan yang sedikit berbeda dengan kabupaten lainnya. Kulon Progo menjamin berobat gratis di puskesmas kepada seluruh penduduk Kulon Progo yang mempunyai KTP atau Kartu Keluarga, dengan demikian tingkat kesehatan Kulon Progo dapat ditingkatkan, karena kesehatan merupakan komponen layanan dasar yang harus mudah untuk diakses”.

Apa yang telah dikemukakan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo tersebut, merupakan sebuah alasan mengapa nilai Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu. Pada tahun 2010 nilai Angka Harapan Hidup paling tinggi adalah Kabupaten Sleman yaitu 73.21 tahun untuk penduduk laki-laki dan 76,86 tahun untuk penduduk perempuan. Adanya bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, tidak mengakibatkan turunnya nilai Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sleman.

Nilai Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul pada tahun 1999 merupakan yang paling rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 67,5 tahun untuk penduduk laki-laki dan 71,5 tahun untuk penduduk perempuan. Namun, pada tahun 2002-2010 perlahan-lahan Kabupaten Bantul dapat meningkatkan nilai Angka Harapan Hidup hingga pada tahun 2010 mencapai 69.42 untuk penduduk laki-laki dan 73.32 untuk penduduk perempuan. Peningkatan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah fasilitas umum yang ada di Kabupaten Bantul. Menurut data BPS pada tahun 1999

Kabupaten Bantul hanya memiliki 3 unit rumah sakit, di tahun 2002 meningkat menjadi 7 unit rumah sakit, dan di tahun 2010 meningkat lagi menjadi 10 unit rumah sakit.

Pada tahun 2002-2010 nilai Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul paling rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pada tahun 2002 68.2 untuk penduduk laki-laki dan 72.2 untuk penduduk perempuan hingga pada tahun 2010 mencapai 69.07 untuk penduduk laki-laki dan 72.99 untuk penduduk perempuan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2002-2005 menurut data BPS Kabupaten Gunungkidul hanya memiliki 1 unit rumah sakit dengan jumlah penduduk pada tahun 2002 sebanyak 749.875 jiwa, dan pada tahun 2005 sebanyak 695.748 jiwa. Padahal, menurut kebijakan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2001 dalam Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal bahwa 1 unit rumah sakit adalah untuk 240.000 jiwa. Dengan demikian kabupaten Gunungkidul pada tahun 2002-2005 dapat dikatakan belum mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai. Pada tahun 2010, fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunungkidul meningkat menjadi 3 unit rumah sakit dengan jumlah penduduk 675.382 jiwa.

Menurut data BPS tahun 2002-2010 Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah paling rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pada tahun 2002 nilai Angka Melek Hurufnya 82% untuk penduduk laki-laki dan 63,9% untuk penduduk perempuan, hingga pada tahun 2010 90,7% untuk penduduk laki-laki dan 77,9% untuk penduduk perempuan. Hal tersebut dipengaruhi oleh motivasi penduduk untuk mendapatkan pendidikan, serta faktor sosial-ekonomi dari penduduk tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat *indepth interview*:

“Di daerah yang kondisinya masih tertinggal secara umum pola pikir masyarakatnya memandang bahwa sekolah hanya menghabiskan uang, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu akan memilih untuk bekerja ketimbang bersekolah. Hal inilah yang

mengakibatkan nilai rata-rata lama sekolah di daerah agak tertinggal nilainya masih rendah. Faktor sosial-ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendidikan, penduduk yang kondisi ekonominya masih rendah tidak dapat menyekolahkan anaknya hingga jenjang lebih tinggi, sedangkan Bantuan Operasional Sekolah hanya sampai SMP saja.”

Nilai Angka Melek Huruf dengan nilai rata-rata lama sekolah penduduk perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat mengimbangi penduduk laki-laki. Kota Yogyakarta adalah yang memiliki *gap* dalam bidang pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuan paling rendah. Hal ini dikarenakan pengaruh dari gelar “Kota Pelajar” yang disandang oleh Kota Yogyakarta menjadikan penduduknya lebih termotivasi untuk meningkatkan pendidikan. Selain itu persepsi penduduk kota bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan memaknai arti pentingnya pendidikan sangat kuat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat *indepth interview*:

“Tingkat pendidikan di kota memang sudah cukup baik, hal ini dikarenakan masyarakat kota mempunyai persepsi bahwa pendidikan merupakan sebuah kunci keberhasilan. Masyarakat kota berfikir bahwa agar dapat bersaing di dunia kerja maka seseorang harus menempuh pendidikan setinggi mungkin.”

Selain itu di Kota Yogyakarta anggaran untuk beasiswa maupun subsidi pendidikannya cukup banyak, sehingga masyarakat yang tidak mampu tetap dapat mengakses pendidikan, dan bagi siswa yang berprestasi terdapat program beasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Sub. Bag. Administrasi Data dan Pelaporan BAPPEDA Kota Yogyakarta pada saat *indepth interview*:

“Anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan di Kota Yogyakarta ini

cukup banyak, yaitu untuk beasiswa untuk penduduk tidak mampu dan beasiswa untuk peningkatan kualitas SDM. Beasiswa subsidi pendidikan diberikan kepada penduduk miskin agar tetap dapat bersekolah, dan untuk siswa berprestasi juga diberikan beasiswa agar lebih termotivasi untuk terus belajar.”

Gap partisipasi pendidikan antara penduduk perempuan dan laki-laki sangat terlihat di Kabupaten Gunungkidul. Pola pikir masyarakat terhadap hal positif yang diperoleh dari hasil pendidikan masih tergolong rendah. Masyarakat pedesaan pada umumnya menganggap bahwa perempuan lebih baik mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja. Hal tersebut mengakibatkan peran perempuan dalam bidang pendidikan sangat rendah. Walaupun pada dasarnya pemerintah tidak membedakan porsi pencapaian pendidikan untuk penduduk perempuan dan laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat *indepth interview*:

“Untuk kebijakan dalam pendidikan yang berbasis gender memang tidak ada, seluruh kebijakan dalam pendidikan tidak memandang perempuan dan laki-laki, semuanya setara.”

Pada tahun 1999-2002 daerah yang angka proporsi perempuan dalam angkatan kerja paling tinggi adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 35,3% pada tahun 1999 dan 35,7% pada tahun 2002. Pada tahun 2005-2010 daerah yang proporsi perempuan dalam angkatan kerja paling tinggi yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat ke dua. Nilai proporsi perempuan dalam angkatan kerja Kota Yogyakarta tahun 2005 38,4% dan pada tahun 2010 41%. Indikator indeks kesehatan dan indikator indeks pendidikan Kabupaten Gunungkidul paling rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun tingkat proporsi perempuan dalam angkatan kerja dapat melebihi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan, sebagian besar

penduduk perempuan di Kabupaten Gunungkidul yang berpendidikan rendah mengisi kesempatan kerja pada sektor informal. Perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih memilih pekerjaan pada sektor formal, sedangkan daya tampung lapangan pekerjaan sektor formal sendiri terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Sub.bag Program dan Informasi Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat *indepth interview*:

“Di Gunungkidul rata-rata penduduk perempuannya harus bekerja untuk membantu suaminya yang gajinya pas-pasan. Dan penduduk perempuan tersebut, sebagian besar bekerja pada sektor informal. Sehingga, walaupun proporsi perempuan dalam angkatan kerja tinggi, namun kondisi ekonominya tetap rendah. Berbeda dengan Kabupaten Sleman, ekonomi daerahnya cukup tinggi tetapi proporsi perempuan terhadap angkatan kerja rendah, soalnya perempuan di Sleman rata-rata pendidikannya sudah tinggi, dan tidak mau bekerja pada sector informal, selain itu gaji suami juga sudah mencukupi bahkan lebih untuk kebutuhan sehari-hari, itulah yang dinamakan dengan pengangguran volentery.”

Kabupaten Sleman pada tahun 1999-2002 nilai proporsi perempuan terhadap angkatan kerjanya paling rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada tahun 2005-2010 nilai proporsi perempuan terhadap angkatan kerja yang paling rendah beralih kepada Kabupaten Kulon Progo. Alasan kondisi Kabupaten Sleman yang demikian adalah seperti yang dipaparkan oleh Kepala Sub.bag Program dan Informasi Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti diatas, yaitu rata-rata pendidikan perempuan di Kabupaten Sleman sudah tinggi sehingga penduduknya hanya mau mengisi kesempatan kerja pada sektor formal saja.

3. Kontribusi antar Indikator dalam IPG

Indikator yang paling berpengaruh terhadap nilai IPG di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1999, 2002, 2005 adalah indeks kesehatan yaitu secara berturut-turut nilainya 76,5%, 76,3%, dan 80%, namun pada tahun 2010 indeks pendidikanlah yang paling berpengaruh terhadap nilai IPG dengan nilai 80,5%. Menurut data BPS nilai Angka Harapan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan paling tinggi di tingkat nasional, sehingga wajar saja jika indeks kesehatan lebih berpengaruh dalam nilai IPG dibandingkan indeks lainnya. Pada tahun 2010 di Daerah Istimewa Yogyakarta sedang dikembangkan wajib belajar 12 tahun. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingginya nilai indeks pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010. Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun saja. Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan:

“ Pada tahun 2010 di DIY mulai dikembangkan wajib belajar 12 tahun, jadi sampai pada tingkatan SMA. Pengembangan tersebut diratakan secara menyeluruh di DIY terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain yang semangat belajarnya belum terlalu tinggi.”

Di Kabupaten Kulon Progo kontribusi indeks kesehatan terhadap nilai IPG sangatlah besar pada tahun 1999, 2002, 2005, dan 2010, dengan nilai 77,5%, 79,3%, 80,3%, dan 82,%. Selama tahun 1999-2010 Kabupaten Kulon Progo dapat stabil mempertahankan nilai indeks kesehatannya tersebut. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo pada saat *indepth interview* mengatakan, bahwa:

“Dalam IPG memang Kulon Progo berusaha mempertahankan dan meningkatkan nilai Angka Harapan Hidup yang sampai sekarang tergolong tinggi di Daerah istimewa Yogyakarta. Karena Angka Harapan Hidup

merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung IPG. Sehingga Pemerintah Daerah Kulon Progo membuat kebijakan berobat gratis di Puskesmas untuk penduduk Kulon Progo yang mempunyai KTP/KK. Program layanan kesehatan untuk perempuan khususnya ibu hamil juga sudah ada, yaitu berupa layanan persalinan gratis dan pemberian vitamin gratis.

Nilai indeks pendidikan di Kota Yogyakarta dari tahun 1999-2010 kontribusinya paling tinggi dibandingkan dengan dua indikator lainnya, yaitu pada tahun 1999, 2002, 2005, dan 2010 secara berturut-turut nilainya 82,7%, 86,9%, 88,3%, dan 91,4%. Tetapi, bukan berarti indeks kesehatan dan indeks ekonomi Kota Yogyakarta menjadi rendah. Walaupun nilai indeks pendidikan Kota Yogyakarta tinggi, namun kontribusi dua indeks lainnya juga termasuk tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut yang menjadikan nilai IPG Kota Yogyakarta paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan merupakan dasar dari indeks lainnya, jika pendidikan di suatu daerah tinggi maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan tinggi, dan jika kondisi ekonomi dan pendidikan suatu daerah tinggi, maka tingkat kesehatan juga akan mengimbangi dengan kualitas hidupnya.

Di daerah yang kondisi topografinya cenderung datar dan tingkat pendidikannya tinggi, maka pertumbuhan ekonominya pun juga cukup tinggi. Karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perhitungan nilai indeks ekonomi dalam IPG tidak hanya berdasarkan dengan proporsi perempuan dalam angkatan kerja, namun ada variabel lain, yaitu kontribusi perempuan dalam pendapatan pada sektor non pertanian.

Nilai proporsi perempuan dalam angkatan kerja di Kabupaten Gunungkidul cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya kecuali Kota Yogyakarta. Namun, kontribusi nilai indeks ekonomi dalam IPG masih rendah jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 nilai indeks ekonomi Kabupaten Gunungkidul adalah 48,86%. Hal ini menurut Kepala Sub.bag. Program dan Informasi Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi dikarenakan, di Kabupaten Gunungkidul rata-rata penduduknya bekerja pada sektor informal, padahal dalam pendapatan perhitungan yang dipakai adalah kontribusi perempuan dalam pendapatan pada sektor non pertanian. Hal ini lah yang mengakibatkan nilai indeks ekonomi Kabupaten Gunungkidul tidak berbanding lurus dengan nilai proporsi perempuan dalam angkatan kerja.

KESIMPULAN

Indeks Pembangunan Gender merupakan alat evaluasi pembangunan suatu daerah yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1999-2010 terus mengalami peningkatan. Kabupaten dengan nilai Indeks Pembangunan Gender paling rendah tahun 1999 adalah Kabupaten Bantul, dan tahun 2002-2010 adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten/kota dengan nilai Indeks Pembangunan Gender paling tinggi dari tahun 1999-2010 adalah Kota Yogyakarta.

Indikator yang paling berkontribusi terhadap pencapaian nilai Indeks Pembangunan Gender adalah indeks kesehatan, dan indikator yang kontribusinya kurang dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender adalah indeks ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 1999. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1999*. Yogyakarta: BPS
- _____. 2002. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2002*. Yogyakarta: BPS

- _____. 2005. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2005*. Yogyakarta: BPS
- _____. 2011. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2010*. Yogyakarta: BPS
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman 2010*. Sleman: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Sleman
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010*. Jakarta: BPS
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2010*. Bantul: BPS Bantul
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2010*. Gunungkidul: BPS Gunungkidul
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo 2010*. Kulon Progo: BPS Kulon Progo
- _____. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2010*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta
- _____. 2011. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: BPS
- _____. 2011. *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: BPS
- _____. dan UNDP. 1997. *Ringkasan Laopran Pembangunan Manusia Indonesia 1996*. Jakarta: BPS
- _____. BAPPENAS, dan UNDP. 2002. *Laporan Pembangunan Manusia 2001: Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: BPS
- UNDP. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press